

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia terdiri atas 17.502 buah pulau, dan garis pantai sepanjang 81.000 km dengan luas wilayah perikanan di laut sekitar 5,8 juta Km², yang terdiri dari perairan kepulauan dan teritorial seluas 3,3 juta Km² serta perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta Km². Fakta tersebut menunjukkan bahwa prospek pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia dinilai sangat cerah dan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang strategis¹. Sehingga, letak posisi seperti ini sangatlah menguntungkan bagi Indonesia dalam bidang kelautan, di mana potensi-potensi yang begitu besar dapat dikelola menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi negara. Mulai dari pembudidayaan tanaman bawah laut, pemanfaatan ikan di laut yang bisa di ekspor atau sebagai konsumsi dalam negeri hingga produksi garam konsumsi maupun industri.

Dalam proses pemanfaatannya, hal ini belum bisa dikatakan berhasil, sebab di tengah upaya pemerintah untuk mengembangkan potensi laut Indonesia, beberapa pihak yang terlibat menginginkan keuntungan tertentu dibalik kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Sebagai contoh Indonesia

¹ Adisanjaya, N. N. (2011). Potensi, Produksi Sumber Daya Ikan Di Perairan Laut Indonesia Dan Permasalahannya. Retrieved Desember 9, 2014, from http://www.academia.edu/6127725/POTENSI_PRODUKSI_SUMBERDAYA_IKAN_DI_PERAIRAN_LAUT_INDONESIA_DAN_PERMASALAHANNYA.

yang juga terkenal sebagai negara agraris dengan sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani khususnya adalah petani beras, masih saja merasa kurang dengan jumlah beras yang ada, sehingga berakibat pemerintah melakukan impor beras. Namun, kebijakan impor beras yang semula dianggap dapat menutupi kekurangan beras yang dikonsumsi negara, berakhir dengan disalahgunakan oleh beberapa pihak.² Begitu juga dalam kasus impor daging sapi yang terjadi beberapa tahun silam (2012-2014), berbagai upaya dilakukan untuk melancarkan impor daging sapi tersebut demi memperoleh keuntungan bagi pihak-pihak yang ikut di dalamnya tanpa mempertimbangkan keberadaan peternak sapi lokal yang juga merasa dirugikan dalam kasus ini.

Dalam setiap pengambilan keputusan khususnya mengenai kebijakan impor maupun ekspor di setiap negara tentunya melibatkan para pemegang kuasa untuk mengeluarkannya. Begitu juga dengan impor garam yang akan menjadi bahan penelitian penulis. Kebijakan pemerintah untuk mengambil keputusan impor garam inilah yang menjadi tanda tanya besar bagi penulis, di mana keputusan yang diambil tersebut apakah murni sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menunjang kebutuhan garam dalam negeri atau hanya sebagai alasan beberapa pihak untuk memperoleh keuntungan sebagaimana dalam kasus-kasus impor yang terjadi sebelumnya.

² Manihuruk, J. (2014, Februari 6). Mafia Beras Libatkan Orang Dalam. Retrieved Desember 9, 2014, from <http://www.mediaindonesia.com/hottopic/read/135/Mafia-Beras-Libatkan-Orang-Dalam/2014/02/06>.

Kebijakan pemerintah untuk mengimpor garam mungkin beralasan, di mana beberapa pihak berpendapat bahwa kualitas garam Indonesia masih dibawah standar³ dan tidak sebanding dengan kualitas milik negara lain seperti Australia. Australia sendiri memiliki peralatan khusus untuk pengelolaan garam sehingga dapat memproduksi garam dengan kualitas baik. Selain itu, produksi garam yang tidak sebanding dengan jumlah yang dikonsumsi masyarakat baik garam konsumsi maupun garam industri sehari-harinya⁴. Namun, jika pemerintah lebih cenderung meningkatkan jumlah impor garam, tentunya keinginan pengusaha garam maupun masyarakat Indonesia untuk lebih meningkatkan sumber daya bagi para pengelolah garam lokal akan terhambat. Sebab, perhatian pemerintah tentunya hanya akan terfokus pada impor tersebut. Ditambah lagi, adanya isu pengambilan keuntungan oleh beberapa pihak dalam proses impor garam ini, hal tersebut tentunya akan semakin membuat para pengelolah garam lokal menjadi berfikir dua kali untuk terus melanjutkan produksi garam, sebab keuntungan yang akan mereka peroleh tidak sebanding dengan biaya produksi mereka di lapangan yang kita tahu masih menggunakan teknologi yang masih sangat minim.

Inilah yang menjadi alasan penulis untuk menjadikan kasus tersebut sebagai sebuah penelitian. Dari kasus ini setidaknya kita dapat mengetahui apa yang mendasari pemerintah melakukan impor garam, karena kebanyakan masyarakat Indonesia juga memiliki pemikiran yang sama, di mana Indonesia adalah negara yang luas wilayah perairannya, namun mengapa sampai garampun

³ Deny, S. (2014). Harga Merosot, Produksi Dan Kualitas Garam RI Perlu Ditingkatkan. Jakarta: Liputan 6 SCTV.

⁴ <http://kkp.go.id/index.php/export/post/c/7347/print/> (diakses 9 Des 2014) pukul 22:20 WIB

Indonesia harus impor dari negara tetangga, apakah memang Indonesia sekarang tengah mengalami krisis ekonomi yang begitu parah sehingga impor menjadi jalan terakhir untuk menutupi kekurangan pangan kita.

Apabila kita menelaah lebih dalam lagi, Indonesia bisa saja menjadi negara produsen garam terbesar di dunia, jika saja pemerintah sadar bahwa sudah saatnya untuk membangkitkan sumber daya petani garam dengan meningkatkan peralatan pengelolaan garam yang lebih modern bukan hanya mengandalkan kekuatan impor yang malah menjurus ke arah pengambilan keuntungan sepihak sebagaimana kasus-kasus impor yang sebelumnya.

B. Latar Belakang Masalah

Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia akan sumber daya alam dengan segala flora, fauna dan potensi hidrografis dan deposit sumber alamnya yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia berasal dari berbagai sumber seperti pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi⁵. Hal ini terkadang tidak disadari oleh beberapa pihak yang ada khususnya masyarakatnya sendiri.

Berlimpahnya Sumber Daya Alam yang dimiliki Indonesia terkadang membuat beberapa negara asing merasa iri. Terbukti dari keberadaan lautnya yang membentang begitu luas melebihi luas wilayah daratannya yaitu seluas 3.302.498 km² sementara luas daratannya 1.890.754 km² dengan total wilayah keseluruhan 5.193.252 km². Luas daratan Indonesia hanya sekitar 1/3 dari luas seluruh

⁵ Sumber Daya Alam <http://www.indonesia.go.id/in/potensi-daerah/sumber-daya-alam> (diakses 12Nov 2014) pukul 22.10 WIB

Indonesia sedangkan 2/3-nya berupa lautan. Dengan perbandingan itu Indonesia dijuluki sebagai negara maritim atau negara kelautan⁶. Dengan julukan seperti ini seharusnya Indonesia bangga dan terus mengembangkan potensi kelautan serta keamanan dari lautnya sehingga tidak akan menimbulkan hal-hal yang merugikan Indonesia sendiri.

Berbicara kembali tentang kelautan, wilayah perairan Indonesia memiliki potensi sebesar 6,26 juta Ton ikan per tahun (belum termasuk ikan hias) sehingga dapat dikatakan potensi eksplorasinya sangat besar. Potensi yang ada tersebut diperkuat oleh pernyataan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia dalam Roadmap Industri Nasional periode 2009-2014 yang menyebutkan bahwa industri kemaritiman dan pengolahan hasil laut merupakan salah satu klaster insdustri unggulan penerimaan devisa negara. Dengan melihat potensi yang begitu besar tersebut, maka diperlukan pula upaya untuk mengeksplorasi dan mengolah sumber daya laut Indonesia yang ada secara tepat dan bijaksana memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi saat ini.⁷

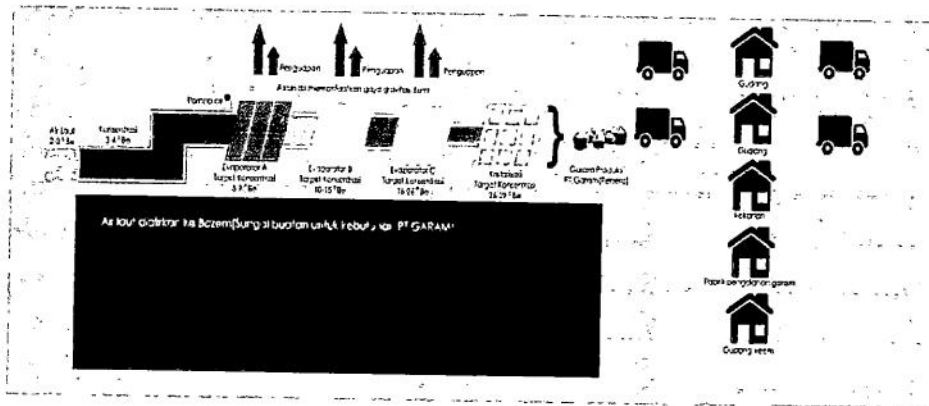
Dalam pembahasan tentang kelautan, bukan hanya potensi ikan saja yang dapat menjadi bahan perbincangan, laut juga identik dengan garam. Laut yang merupakan bahan dasar garam menjadi isu terhangat lima tahun terakhir (2009-2014), sebab beberapa opini masyarakat khususnya masyarakat Indonesia mengatakan bahwa "*garamku tak asin lagi*" istilah ini muncul dikarenakan keberadaan produksi serta konsumsi garam Indonesia yang tidak stabil. Ditambah

⁶ INDONESIA <http://indonesiabloggerku.blogspot.com/2013/01/luas-wilayah.html> (diakses 10 Nov 2014) pukul 00.59 WIB

⁷ <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-16759-Chapter1-pdf.pdf> (diakses 10 Nov 2014) pukul 00.45 WIB

lagi teknologi yang dipakai Indonesia masih terbilang sangat tradisional yang masih sangat bergantung pada cuaca. Ketika musim penghujan tiba secara tidak langsung pembuatan garam harus di hentikan karena garam tradisional masih sangat bergantung pada panasnya matahari. Seperti yang tertera pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1 Proses Pembuatan Garam Tradisional⁸



Sumber : PT Garam Persero 2015

Tahapan pembuatan garam dalam PT. Garam (Persero) :

1. Air laut dialirkan ke Bozem (sungai buatan untuk kebutuhan PT. Garam)
2. Dari bozem, air dipompa ke evaporator A, evaporator B dan evaporator C
3. Air dari satu evaporator akan dialirkan ke evaporator berikutnya jika mencapai target konsentrasi
4. Selama proses pengolahan air laut di evaporator terjadi pengendapan unsur-unsur kimia yang tidak dibutuhkan (Fe_2O_3 , $CaCO_3$, $CaSO_4$, $2H_2O$)

⁸ PT Garam Persero <http://www.ptgaram.com/#sistemproduksi> (diakses 22 Jan 2015) pukul 10.59

5. Jika konsentrasi air di evaporator C siap untuk dikristalisasi, maka air dialirkan ke lahan kristalisasi
6. Pungutan awal garam dipadatkan sebagai Bottom Layer, sehingga selanjutnya akan melakukan pungutan garam di atas lantai garam.

Dari gambar di atas kita bisa melihat bagaimana proses pembuatan garam lokal yang masih melalui beberapa proses selama sehari-hari dari setiap tahapnya, ditambah lagi kendala yang disebabkan oleh cuaca yang tentunya akan memperhambat proses pembuatan garam.

Luasnya laut yang membentang dari Sabang sampai Merauke ini tidak selamanya menjamin melimpahnya potensi garam Indonesia. Terbukti pada tahun 2006 hingga 2010 produksi garam lokal Indonesia hanya berkisar 969.761 ton⁹, hal ini dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi pada saat itu sehingga mengakibatkan produksi garam dalam negeri berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang jumlahnya di atas 1 juta ton dan tahun berikutnya pada tahun 2011 meningkat menjadi 1.343.000 ton¹⁰.

Pada tahun 2011 Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa kebutuhan garam nasional pada tahun tersebut sebanyak 3,4 juta ton, termasuk di antaranya 1,6 juta ton untuk garam konsumsi dan 1,8 juta ton garam industri.¹¹ Jika kita kalkulasikan kebutuhan garam Nasional memang kurang tercukupi, karena kita masih kekurangan 2.057.000 ton garam. Sehingga, secara

⁹ Kebijakan impor Garam Indonesia (2004-2010): Implikasi Liberalisasi Perdagangan Terhadap Sektor Pergaraman Nasional, Intan Sari Boenarco (diakses 12 Nov 2014) pukul 22.11

¹⁰ Kebijakan impor Garam Indonesia (2004-2010): Implikasi Liberalisasi Perdagangan Terhadap Sektor Pergaraman Nasional, Intan Sari Boenarco (diakses 12 Nov 2014) pukul 22.11

¹¹ Menteri Fadel Malu Indonesia Kini Impor Garam
<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/244095-fadel--indonesia-malu-sebab-masih-impor-garam>
(diakses 10 Nov 2014) pukul 02.08 WIB

tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan garam yang belum memadai pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan impor garam dari negara penghasil garam lainnya.

Dalam proses impor garam beberapa pertimbangan dijadikan alasan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan tersebut. Kurangnya produksi garam dalam negeri serta rendahnya kualitas garam lokal adalah dua dari contoh sederhana pengambilan keputusan impor garam ini. Pada tahun 2007-2012 misalnya, Indonesia melakukan impor garam baik garam belerang, bumi, batu, kapur dan semen dengan jumlah yang cukup tinggi hingga puncaknya terjadi pada tahun 2011-2012 yang mengalami peningkatan signifikan.

TABEL 1.1 Import By HS Section and Chapters (HS)¹²

	NET WEIGHT (KG)	CIF VALUE (US\$)
January-December 2007	6 621 276 286	429 170 639
January-December 2008	7 344 378 568	842 782 632
January-December 2009	6 805 173 353	617 602 082
January-December 2010	8 525 885 941	708 808 047
January-December 2011	10 127 190 656	938 042 571
January-December 2012	11 430 752 137	1 099 720 012

Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2014

Jika kita hitung kembali produksi, konsumsi dan impor pada tahun 2011, dapat kita lihat adanya kelebihan kuota impor yang dilakukan oleh pemerintah

¹² Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2014

dalam hal ini. Sehingga, hal ini tentunya sangat merugikan petani garam maupun negara. Dengan biaya impor dibawah 20% tentunya lebih menarik pihak importir/ekportir maupun pemerintah untuk melakukan impor garam ini¹³.

Tidak mengherankan mengapa Indonesia cenderung melakukan impor garam dari beberapa negara tetangga, rendahnya kualitas garam yang dimiliki oleh negara kita juga rendahnya produksi garam disetiap tahunnya sementara kebutuhan semakin meningkat serta minimnya peralatan modern yang dimiliki oleh para petani garam lokal menjadi beberapa alasan kuat pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan impor. Ditambah lagi rendahnya biaya impor garam yang diberlakukan di Indonesia, memudahkan para importir garam tadi untuk memuluskan aksinya.

C. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang yang dijelaskan di atas kita dapat menarik inti dari pokok permasalahan yang akan dibahas adalah; *“Mengapa pemerintah memilih untuk melakukan liberalisasi impor garam ketimbang meningkatkan kapasitas dan kualitas garam lokal”*

D. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Ekonomi Liberal

Sistem perekonomian/tata ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan

¹³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.001/2011

ekonomi seperti memproduksi barang, menjual, impor, ekspor dan lain sebagainya. Dalam perekonomian liberal, setiap warganya dapat menentukan nasibnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas.

Kembali lagi bahwa sistem yang dianut dari negara barat ini adalah salah satu sistem ekonomi yang dengan terang-terangan mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa sedikit mempertimbangkan keberadaan masyarakat lain seperti petani garam lokal. Memang dalam sistem ini setiap individu baik masyarakat biasa maupun pemerintah diberikan kebebasan sebesar-besarnya untuk melakukan transaksi ekonomi baik dalam maupun luar negeri. Akan tetapi, bukan tidak mungkin semuanya melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan negara, apalagi menyangkut impor maupun ekspor.

Untuk masyarakat yang dalam hal ini adalah petani garam tentu tidak menginginkan adanya impor garam yang dilakukan oleh pemerintah, sebab mereka menilai hal ini akan merugikan produksi garam lokal mereka. Namun, pemerintah berfikir lain, mereka mempertimbangkan bahwa jika impor garam tidak dilakukan yang ada malah Indonesia akan kekurangan garam baik garam konsumsi maupun produksi. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk mengimpor garam dari beberapa negara sekitar.

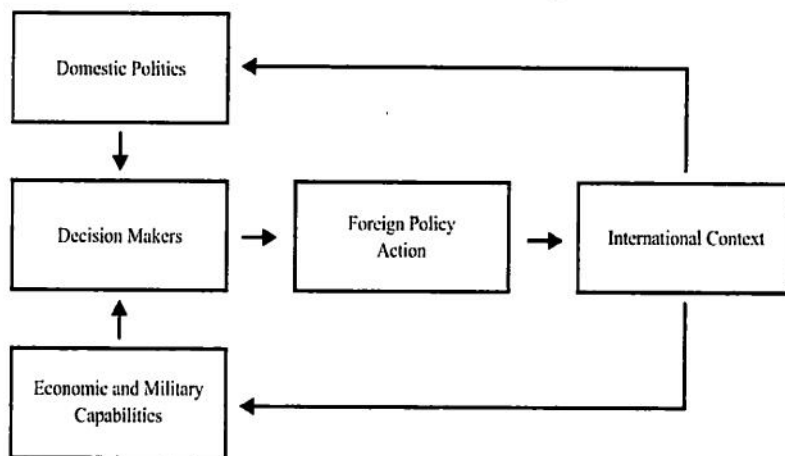
Konsep ini dapat digunakan dalam kasus ini, di mana pemerintah bebas dan berhak melakukan atau mengambil kebijakan tertentu yang menurutnya penting demi kelangsungan ekonomi negara, yang tentunya dengan melihat

kondisi dan mempertimbangkan beberapa aspek dari negara tersebut. Hal inilah yang mungkin sedang dirasakan oleh pemerintah Indonesia. Mengambil kebijakan liberalisasi impor pangan adalah pilihan yang memungkinkan dapat menutupi kebutuhan garam yang tiap tahun bertambah.

Selain itu, keberadaan organisasi perdagangan dunia (WTO) sebagai salah satu badan yang mengawasi perdagangan internasional juga menjadi awal dari masuknya impor-ekspor secara bebas dengan tarif bea masuk rendah bahkan di era sekarang, dapat dikatakan berbagai perjanjian yang diikuti baik oleh Indonesia maupun negara lain menerapkan bea masuk mencapai 0%.

2. Teori Pembuatan Kebijakan (Decision-Making Theories) oleh William D.

Coplin



Sumber: *W.D Coplin & C.W. Kegley, Multi Method Introduction to International Politics, Markham Publishing Company, Chicago, 1971, hal. 30-1.*

Dalam hal ini, penulis menggunakan teori dari William D. Coplin untuk menganalisa dan membatasi masalah yang dikaji sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa biasanya para pengambil

keputusan memiliki banyak pertimbangan sebelum pelaksanaan proses pengambilan keputusan.

Menurut Coplin, kebijakan luar negeri suatu negara dapat dianggap sebagai hasil dari tiga faktor yang mempengaruhi, yaitu konteks internasional, politik domestik, serta kemampuan ekonomi dan militer. Teori ini dapat diimplementasikan dalam permasalahan di mana pemerintah mengambil keputusan untuk mengimpor garam dari negara lain yang mungkin disebabkan beberapa faktor yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu.

Dalam kebijakan impor garam ini, banyaknya faktor yang dilihat sehingga pemerintah mengambil keputusan tersebut. Produksi garam Indonesia yang masih kurang dari jumlah konsumsi merupakan salah satu alasan kuat bagi pemerintah untuk kebijakan tersebut. Disamping itu tentunya masih banyak alasan-alasan lain yang mempengaruhinya. Akan tetapi, masyarakat juga menginginkan suatu gerakan khusus dari pemerintah dan pihak yang terkait berupa bantuan bagi para petani garam untuk lebih meningkatkan sumber daya manusianya, bukan hanya bergantung pada impor garam semata. Serta, kerjasama berbagai pihak dalam meningkatkan industri garam lokal.

Masyarakat menginginkan transparansi dari setiap kebijakan yang diambil oleh para pembuat kebijakn. Hal ini disebabkan masyarakat khawatir apabila kebijakan ini hanya menjadi alasan bagi pihak-pihak yang bersembunyi dibalik kebijakan impor tersebut. Memang, UU telah mengatur tentang keberlangsungan ekonomi Indonesia yang disusun oleh negara, salah satunya dalam UU Republik Indonesia pasal 33 tahun 1945 ayat 1 samapi dengan 3 menyatakan bahwa :

1. *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.*
2. *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
3. *Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Ayat-ayat di atas menerangkan bahwa segala bentuk perekonomian dalam negeri diatur oleh pemerintah dengan mempertimbangkan masyarakat pada khususnya serta keberadaan sumber daya alam dimanfaatkan, diolah dan digunakan oleh pemerintah demi kemaslahatan bersama.

Namun, pemerintah daerah maupun pusat juga harus mempertimbangkan keberadaan masyarakat kecil khususnya bagi para petani garam lokal dan mempertimbangkan berbagai dampaknya baik dampak dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Aplikasi Teori :

1. Domestic Politics : Kurangnya dorongan khusus dari Asosiasi Petani Garam Indonesia terhadap pemerintah untuk mendukung industri garam lokal, membuat pemerintah merasa tidak terikat dalam memajukan industri garam tersebut. Sehingga, bukan tidak mungkin pemerintah bersikap 'cuek' terhadap petani garam lokal tadi.
2. Economic and Military Capabilities : Adanya Dominasi Importir Garam yang dikuasai oleh para importir dari beberapa negara tetangga, seperti

Australia, Selandia Baru serta Singapura dalam melobi pemerintah Indonesia untuk mengimpor garam negara mereka dengan kualitas maupun kapasitas yang diharapkan.

3. **Decision Makers** : Pengambil keputusan yang dimaksud adalah Kementrian Perdagangan Indonesia juga Kementrian Perindustrian yang pada saat itu mengambil kebijakan untuk mengimpor garam dari beberapa negara tetangga. Keputusan ini diambil di dasarkan pada alasan yang menurut mereka mengharuskan Indonesia melakukan impor garam.
4. **Foreign Policy Action** : Akibatnya dari berbagai dorongan yang ada, pemerintahpun mengeluarkan izin impor garam di Indonesia. Impor ini tentunya bukan hanya menguntungkan pihak importir semata, tetapi juga beberapa pihak yang ikut '*bermain*' didalamnya.
5. **International Context** : Dalam hal ini yang menjadi Konteks Internasional adalah Pasar Garam Dunia, di mana pasar tentunya akan lebih mendukung keberadaan industri garam maju ketimbang industri garam berkembang sebagaimana yang dimiliki Indonesia.

E. Hipotesis

Dari uraian singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah mengenai alasan pemerintah mengambil keputusan impor terhadap kebutuhan garam dalam negeri serta kerangka teori yang akan digunakan oleh penulis, hipotesa awal penulis adalah berupa :

1. Industri Garam Lokal belum memiliki asosiasi yang kuat yang bisa mendorong pemerintah dalam menunjang SDM petani garam dalam negeri.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Penulis melengkapi data dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang telah dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dan literatur-literatur yang relevan seperti buku-buku panduan, data elektronik (internet), dan data lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah.

2. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan pada pembuatan makalah ini adalah dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa data-data yang diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai topik yang akan dibahas. Kemudian data-data tersebut diolah sesuai dengan materi pembahasan dalam tulisan ini.

Impor garam yang dilakukan pemerintah dan kesejahteraan petani garam Indonesia merupakan variabel yang memiliki keterkaitan dan perlu untuk dianalisis. Petani yang menggantungkan kehidupannya pada pertanian garam akan merasakan dampak dari impor tersebut secara langsung. Dan tentu saja ini sangat berhubungan erat dengan kesejahteraan petani garam itu sendiri terutama dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan impor garam yang dilakukan oleh pemerintah akan berpengaruh terhadap

kesejahteraan petani garam Indonesia, terutama petani kecil. Pengaruh tersebut bisa ditinjau dari dua aspek baik ekonomi maupun aspek sosial.

G. Batasan Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, agar tidak terjadi pembahasan yang meluas, jangkauan penelitian atau ruang lingkup skripsi ini hanya akan membahas alasan utama pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mengeluarkan kebijakan impor garam dari beberapa negara tetangga Indonesia ditengah keberadaan Indonesia sebagai negara maritim maupun agraris.

Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia memiliki perairan yang luas dengan sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani yang mana memiliki keterampilan bertani sejak zaman dulu dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Namun penulis tidak mengesampingkan data-data di luar jangkauan atau rentang tahun tersebut sehingga dimungkinkan akan ada pembahasan atau data-data di luar tahun tersebut yang diperoleh, selama masih berkaitan dan relevan dengan masalah ini.

H. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan alasan pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan atas impor garam yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini sehingga akan didapat pemahaman dari rumusan masalah, hipotesis, dan kesimpulan yang didapat. Juga sebagai bahan bacaan yang berguna bagi siapa saja yang membutuhkannya, sebab masih

banyak yang belum tahu informasi tentang adanya impor garam yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan beberapa alasan yang mereka pikirkan. Selain itu penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk mengaplikasikan atau menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di perkuliahan, serta untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar kesarjanaan (S1) pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

I. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penulisan, batasan penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan sejarah pergaramn di Indonesia mulai zaman kolonial hingga sekarang, tingkat produksi garam lokal, tingkat konsumsi garam Indonesia, juga sejarah awal mula impor garam Indonesia.

BAB III pembahasan tentang lemahnya asosiasi petani garam lokal Indonesia.

BAB IV pembahasan tentang dominasi importir garam asing dalam melobi pemerintah lokal.

BAB V merupakan kesimpulan atau penutup dari keseluruhan bab yang telah dibahas, berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.